

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD: Eksekutif Tak Transparan, Pembahasan Anggaran Terhambat

Anggota DPRD baru menerima KUA-PPAS 2020 beberapa menit sebelum rapat dimulai.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 berjalan lambat karena pemerintah dinilai tidak transparan. Bahkan hingga saat ini, tak ada satu pun anggota DPRD yang menerima rincian Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 secara lengkap.

"Saya akan menyurati Gubernur (Anies Baswedan) untuk meminta dokumen itu dibuka," kata Prasetyo, kemarin. "Agar kami bisa bahas bersama dan bisa disahkan sesuai dengan ketentuan."

Menurut Edi, karena anggota Dewan terlambat menerima dokumen, mau tidak mau rapat di tiap komisi juga terhambat. Sehingga tidak mengherankan jika rapat pembahasan sering diwarnai interupsi. "Kami terima rincian KUA-PPAS hanya beberapa menit sebelum rapat dimulai," katanya. "Saat rapat, kami harus menyisir satu per satu detail anggaran yang diajukan."

Pemerintah Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies, memang tak lagi mengunggah dokumen KUA-PPAS ke [website Apbd.dkijakarta.go.id](http://website.apbd.dkijakarta.go.id). Rencananya dokumen itu akan di-publish setelah APBD 2020 disahkan.

Wakil Ketua DPRD Zita Anjani menilai langkah pemerintah itu tidak bijaksana. Sebab, tanpa rincian KUA-PPAS, anggota Dewan tidak mungkin bisa mempelajari rencana penggunaan anggaran tahun depan. "Bagaimana caranya anggaran triliunan rupiah dengan ribuan detail kegiatan bisa dibahas hanya di rapat saja," kata dia. "Kalau begitu terus, kami tak bisa kerja. Kalau bicara anggaran, kasih dokumennya, jangan kami disuruh meraba-raba sendiri."

Rincian anggaran KUA-PPAS 2020 menjadi polemik sejak DPRD dan pemerintah DKI mulai menggelar rapat pembahasan secara maraton di tiap komisi, dua pekan lalu. Satu per satu anggota komisi mempersoalkan rincian anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai terlalu besar dan tak realistis. Beberapa anggaran tersebut kemudian direvisi, bahkan ada yang dihapus.

Pada sejumlah rapat pembahasan, terkuak anggaran-anggaran janggal yang kental dengan dugaan korupsi, di antaranya anggaran pengadaan lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar untuk sekolah dasar. Anggaran ini diajukan oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur. Kemudian ada juga anggaran konsultan program penataan kampung kumuh atau *community action plan* (CAP) yang nilainya Rp 566

juta per rukun warga.

Anggota Komisi D atau Bidang Pembangunan, Pantas Nainggolan, menyebutkan setiap satuan kerja perangkat daerah sudah diminta untuk merevisi anggaran-anggaran janggal dalam KUA-PPAS 2020. Hasil revisi harus segera diserahkan kembali ke masing-masing komisi pada pekan ini. "Karena mulai pekan depan harus sudah dimulai pembahasan di Badan Anggaran," kata Pantas. "Kami harus bekerja keras agar tetap sesuai dengan jadwal tetapi kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan."

Anggota Komisi B, Abdul Aziz, juga mengatakan, hingga kemarin pembahasan anggaran di tiap komisi belum ada yang rampung. "Sudah molor dari jadwal," katanya. Seharusnya DPRD dan pemerintah provinsi sudah menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS 2020 pada Selasa lalu. "Sekarang, meski masih masa reses, tapi anggota DPRD tetap datang rapat. Bahkan jumlah kehadiran lebih dari 60 persen."

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra), Misbah Hasan, menilai bahwa pembahasan KUA-PPAS 2020 rentan disusupi anggaran janggal. Sebab, pemerintah memilih untuk menutup akses informasi bagi masyarakat. Apalagi waktu pembahasan sudah mepet se-

hingga membuka ruang lolosnya anggaran siluman.

"Anggota Dewan membahas terburu-buru dan masyarakat tak bisa mengakses informasi. Ini aneh. Padahal masyarakat punya hak untuk mengetahui anggaran itu," kata Misbah.

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan hanya meminta seluruh SKPD dan DPRD membahas rancangan APBD 2020 dengan cepat agar bisa memenuhi tenggat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri. Dia telah meminta SKPD merevisi sejumlah anggaran yang dinilai janggal. "Segeraperbaiki (anggaran-janggal). Saya tak anti-kesalahan. Tapi saya anti-kesalahan yang berulang. Jadi, jangan seperti ini lagi," kata Anies. ● IMAM HAMDI